

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait Pemenuhan Prinsip Akuntabilitas dalam Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lanud Adi Soemarmo, Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemenuhan Prinsip Akuntabilitas Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lanud Adi Soemarmo, Faktor Penghambat Pemenuhan Prinsip Akuntabilitas Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lanud Adi Soemarmo, dan Pengawasan Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lanud Adi Soemarmo, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lanud Adi Soemarmo terdapat 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengajuan, tahap penetapan, dan tahap pendaftaran. Tahap persiapan dan pengajuan dilakukan oleh Komandan Lanud Adi Soemarmo. Tahapan tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan Barang Milik Negara khususnya kendaraan dinas seperti Kartu Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB). Apabila Barang Milik Negara tersebut tidak mempunyai BNKB, maka dokumen tersebut dapat digantikan

dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Adi Soemarmo yang menyatakan bahwa kendaraan dinas tersebut adalah Barang Milik Negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di Lanud Adi Soemarmo. Namun setelah itu, Setelah kedua tahapan selesai diteruskan kepada instansi pengelola barang untuk meneliti dan menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas. Tahap terakhir adalah tahap pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna barang. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara akan ditulis pada Daftar Barang Barang atau Daftar Kuasa Barang Pengguna.

2. Pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemenuhan prinsip akuntabilitas di Lanud Adi Soemarmo dilakukan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah adanya pelaporan tanggung jawab yang dilakukan secara rutin oleh Komandan Lanud Adi Soemarmo terhadap penggunaan kendaraan dinas. Setiap pegawai mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing. Hal tersebut dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara dan juga sebagai implikasi secara langsung dari prinsip akuntabilitas. Dalam penggunaan kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo mayoritas sudah sesuai dengan tugas dan fungsi utama Lanud Adi Soemarmo.
3. Faktor pendukung prinsip akuntabilitas penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo yaitu sumber daya manusia

yang berkualitas. Setiap pegawai dibekali oleh pengetahuan yang luas tentang pengelolaan Barang Milik Negara sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara. Pengetahuan tersebut didapatkan dari pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi anggota TNI ataupun PNS di lingkungan Lanud Adi Soemarmo. Faktor pendukung lainnya adalah adanya sarana dan fasilitas yang menunjang di Lanud Adi Soemarmo sehingga dapat memaksimalkan penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas. Faktor pendukung terakhir adalah adanya dukungan dari bagian-bagian Lanud Adi Soemarmo seperti pada penomoran nomor polisi kendaraan dinas yang dibantu oleh bagian Satpom AU.

4. Faktor penghambat dalam prinsip akuntabilitas penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo adalah adanya masalah waktu. Masalah waktu seperti keterlambatan sering terjadi pada saat melakukan persiapan pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara. Faktor penghambat lainnya adalah masih adanya penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Lanud Adi Soemarmo seperti menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi oleh beberapa pegawai. Adapun cara mengatasi faktor penghambat yaitu pengenaan sanksi yang setimpal setiap ada pelanggaran yang dilakukan pegawai dan juga pengawasan ketat terhadap penggunaan kendaraan dinas di Lanud Adi Soemarmo.
5. Lanud Adi Soemarmo melakukan pengawasan penggunaan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas guna mencegah adanya kecurangan dan

pelanggaran dalam penggunaan kendaraan dinas. Pengawasan di Lanud Adi Soemarmo dilakukan secara periodik dimana Komandan Lanud Adi Soemarmo mengunjungi masing-masing bidang untuk melihat pelaksanaan penggunaan kendaraan dinas secara langsung. Pihak yang bersangkutan tersebut adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo, Kepala Dinas Logistik dan juga seluruh pegawai baik TNI maupun PNS yang berada di lingkungan Lanud Adi Soemarmo.